



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1456 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan yang terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan pada Biro Organisasi dan

N

Kepegawaian Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 883 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Rincian jenis penetapan kebutuhan (formasi) di lingkungan Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditentukan berdasarkan alokasi kebutuhan (formasi) yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

KEDUA : Jenis Penetapan kebutuhan (formasi) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2022

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal, ✍

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a short vertical stroke.

SUHANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1456/TAHUN 2022
 TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH TOTAL	PENEMPATAN
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN	2 6 1 1	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
2	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 ILMU KEPEGAWAIAN / S-1 ILMU SOSIOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN	1 3 1 4	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
3	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN / D-IV MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN	8 1 3 1 4 1 1 1	SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH TOTAL	PENEMPATAN
		S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 ILMU KEPEGAWAIAN / S-1 ILMU SOSIOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN	1	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
4	NEGOSIATOR PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 KEUANGAN / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI DAN BISNIS / S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIKA / S-1 PERTANIAN	1 11	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
		S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL DAN POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI DAN BISNIS / S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIKA / S-1 PERTANIAN	8	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
		S-1 KEARSIPAN / D-IV MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN	7	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
		S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 ILMU KEPEGAWAIAN / S-1 ILMU SOSIOLOGI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN	5	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
5	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUN / D-IV MANAJEMEN	4 2	SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
			1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH TOTAL	PENEMPATAN
			4	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
6	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN	2	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
7	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI / S-1 STATISTIK	6	SEKRETARIAT JENDERAL
			3	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
			1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
			5	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
			6	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
			1	INSPEKTORAT JENDERAL
			2	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
			2	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
8	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	4	SEKRETARIAT JENDERAL
			2	INSPEKTORAT JENDERAL
			1	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
			1	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
			1	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH TOTAL	PENEMPATAN
9	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	8	SEKRETARIAT JENDERAL
			1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
			2	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
			1	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
10	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / D-IV MANAJEMEN	1	SEKRETARIAT JENDERAL
11	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	3	SEKRETARIAT JENDERAL
			1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
			5	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
			2	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
12	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	S-2 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-2 MANAJEMEN / S-2 ADMINISTRASI	10	SEKRETARIAT JENDERAL
13	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III ARSIPARIS	10	SEKRETARIAT JENDERAL
			1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
			1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
14	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III KOMUNIKASI	3	SEKRETARIAT JENDERAL
15	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI	1	SEKRETARIAT JENDERAL

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH TOTAL	PENEMPATAN
16	PUSTAKAWAN TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN	1	SEKRETARIAT JENDERAL
17	STATISTISI TERAMPIL	D-III STATISTIKA / D-III STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Total Formasi			174	

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal,



SUHANTO